



**KAJIAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN DAMPAK *E-BUDGETING*
DALAM MEWUJUDKAN *GOOD GOVERNANCE***

Ghaliyah Nimassita Triseptya¹, Arifuddin², Rahmawati³

¹Universitas Fajar, ^{2,3}Universitas Hasanuddin

Email: ghaliyah@unifa.ac.id

Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Implementasi, Dampak, E-Budgeting, <i>Good Governance</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan e-budgeting serta dampaknya dalam mewujudkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> pada sektor pemerintahan daerah. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (<i>library research</i>) melalui penelusuran jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, serta dokumen akademik yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan e-budgeting mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan anggaran publik. Sistem ini memperkuat mekanisme pengendalian internal melalui pencatatan elektronik, otomasi pelaporan, pemantauan <i>real-time</i> , dan jejak audit yang lebih jelas. Integrasi antara <i>e-planning</i> dan <i>e-budgeting</i> juga terbukti meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah serta meminimalkan peluang terjadinya penyimpangan anggaran. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola organisasi, budaya birokrasi, serta integritas aparatur pemerintah. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi e-budgeting tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, komitmen etika aparatur, serta konsistensi kebijakan dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas publik. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengintegrasikan reformasi digital dengan reformasi kelembagaan dan budaya organisasi guna memastikan e-budgeting berfungsi secara optimal sebagai instrumen strategis dalam memperkuat <i>good governance</i> dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
Keywords: Implementation, Impact, E-Budgeting, <i>Good Governance</i> .	<i>This study aims to examine the implementation of e-budgeting policies and their impact on the realization of good governance principles in local government. The research adopts a library research approach by reviewing scientific journals, academic books, official reports, and relevant policy documents. The findings indicate that the implementation of e-budgeting significantly enhances transparency, accountability, efficiency, and effectiveness in public budget management. The system strengthens internal control mechanisms through electronic record-keeping, automated reporting, real-time monitoring, and clearer audit trails. Furthermore, the integration of e-planning and e-budgeting has been shown to improve coordination among local government agencies and reduce opportunities for budgetary irregularities. Nevertheless, the effectiveness of e-budgeting implementation is highly influenced by the quality of organizational governance, bureaucratic culture, and the integrity of public officials. The implications of this study suggest that the success of e-budgeting implementation depends not only on technological readiness but also on the strengthening of human resource capacity, ethical commitment of public</i>

officials, and policy consistency in promoting transparency and public accountability. Therefore, local governments are encouraged to integrate digital reform with institutional and cultural reforms to ensure that e-budgeting functions optimally as a strategic instrument for strengthening good governance and enhancing public trust in local public financial management.

I. PENDAHULUAN

Penerapan *e-government* salah satunya dilakukan dalam lingkungan pemerintahan daerah pada bidang pengelolaan penyusunan anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat pemerintah daerah melalui sistem *e-budgeting* dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk perencanaan anggaran daerah. Pemerintah daerah melakukan sistem *e-budgeting* dalam perencanaan anggaran di era otonomi daerah dapat dilihat dalam dua hal, yaitu sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat terkait alokasi dana dari pajak rakyat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Menanggapi adanya berbagai penyimpangan politik dalam anggaran publik, perencanaan anggaran secara elektronik dapat meminimalisir kemungkinan korupsi dengan kontrol/monitoring masyarakat melalui sistem *e-budgeting*. Sistem *ebudgeting* ini, jika dikombinasikan dengan penerapan *e-procurement* (Layanan Pengadaan Secara Elektronik/LPSE) dan *e-sourcing* (sistem pendukung pengadaan barang), akan menjadi cara yang ampuh untuk menangkal berbagai macam modus korupsi. Misalnya, manipulasi spesifikasi barang, penggelembungan harga, manipulasi proses tender, dan realisasi penggunaan anggaran yang tidak wajar (Husodo, 2018).

Untuk membangun pemerintahan yang baik, sangat penting untuk mengetahui prinsip-prinsip menyeluruhnya, seperti desakan demokrasi bahwa semua kekuatan politik berada di tangan dan pada akhirnya bertanggung jawab kepada rakyat, dan prinsip keadilan dan janji kesetaraan sosial untuk memfasilitasi implementasi kebijakan progresif yang menguntungkan sebagian besar penduduk. Struktur organisasi dan dinamika antarpribadi merupakan dua bidang yang mau tidak mau dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Akibatnya, rutinitas sehari-hari masyarakat di berbagai bidang harus beradaptasi. Pelayanan publik, seperti yang diberikan oleh berbagai instansi pemerintah, adalah salah satu contohnya. Pengembangan model layanan publik elektronik dimungkinkan oleh kemajuan teknologi komputasi dan komunikasi (*E-government*). Salah satu inovasi *good governance* dan contoh pemanfaatan teknologi informasi, penggunaan program komputer berbasis web untuk mengefektifkan penyusunan APBD saat ini sedang dilaksanakan. Hal ini penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dalam pengelolaan anggaran daerah, atau bisa juga berarti penganggaran elektronik, yang merupakan metode populer untuk melacak uang. Surakarta merupakan salah satu kota yang sedang berproses menjadi *Smart City* dengan menerapkan teknologi yang semakin maju, seperti aplikasi Solo Destination. Saat ini, Surakarta merupakan salah satu kota yang menggunakan *E-budgeting* untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap belanja pemerintah dengan membuat belanja lebih transparan. Website ini dikelola oleh Badan Litbang Daerah, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistika, dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta. Ini merupakan langkah awal untuk memfasilitasi open data di instansi pemerintah yang responsif dan akuntabel (Arini dan Nasehati, 2022).

Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap reformasi birokrasi telah mendorong pemerintah untuk menerapkan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan urusan publik. *Good governance* secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah dengan sistem pengelolaan yang baik berdasarkan prinsip dan karakteristik tertentu. Selain menjadi sikap dan tradisi baru, penerapan prinsip *good governance* juga menjadi orientasi model penyelenggaraan pemerintahan baik pada pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam bidang pengelolaan keuangan. Hal ini dikarenakan kunci utama keberhasilan pengelolaan keuangan adalah memahami dan melaksanakan prinsip-prinsip *good governance* (Suwanda, 2019) dalam

(Almuttaqin, dkk 2021). Penerapan prinsip-prinsip *good governance* diperkuat oleh Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan setidaknya dua hal penting, yaitu (1) proses pengelolaan keuangan di daerah harus dilakukan secara tertib, taat terhadap peraturan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat. Asas tersebut menjadi penting sebagai adaptasi penerapan prinsip *good governance* dan (2) keuangan daerah terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan setiap tahunnya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) dan dilaksanakan dalam sistem yang terintegrasi (PP No. 12 Tahun 2019) (Almuttaqin dkk 2021).

Good Governance merupakan suatu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintah yang baik (Mardiasmo, 2009:34). Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dalam mencapai suatu pemerintahan yang baik untuk *good government* ialah e-government yang di instruksikan oleh Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Instruksi ini berlaku mencakup segala bentuk pemerintahan meliputi kementerian sampai pemerintah daerah (Husodo, 2018)

Penelitian ini merupakan kajian literatur yang mengungkap implimentasi *E-budgeting* dalam mewujudkan *good governance* dilihat dari sisi kebijakan dan dampak penerapannya. Penelitian ini menggunakan data sekunder, data sekunder ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang mana dapat melalui media perantara. Media perantara data sekunder yaitu melalui buku-buku, jurnal, artikel, blog-blog resmi dan dari data akademik atau data laporan yang kami jadikan acuan dan informasi-informasi dari sumber-sumber resmi yang khususnya berkaitan dengan e-budgeting (Rafiqi dkk, 2021).

Perjalanan Implementasi *E-budgeting* pada pemerintahan

Perjalanan implementasi *e-budgeting* di pemerintahan tampak berlangsung bertahap: dimulai dari inisiatif awal di pemerintah provinsi seperti DKI Jakarta, di mana Rahman et al. (2019) menemukan bahwa sejak diterapkan sekitar 2013 sistem *e-budgeting* secara bertahap mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun masih menghadapi kendala infrastruktur TI, SOP yang belum lengkap, dan kebutuhan peningkatan kapasitas SDM. Penelitian Gamayuni dan Agusta (2019) menunjukkan bahwa di Provinsi Lampung, *e-planning* dan *e-budgeting* sudah diimplementasikan lebih dari 10 tahun dan mulai beranjak dari fase "pengenalan teknologi" menuju fase konsolidasi, di mana kesiapan SDM, pendidikan pengguna, dan dukungan pendanaan menjadi faktor kunci, sekaligus mendorong prinsip *good governance* dan partisipasi masyarakat yang lebih baik. Pada level kota, studi kasus Surabaya oleh Rafiqi dan Selviyanti (2020) dengan model CIPP menegaskan bahwa implementasi *e-budgeting* dinilai efektif dan layak dilanjutkan karena terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas APBD, meski masih memerlukan penguatan pada aspek server dan pelatihan berkelanjutan. Secara sintesis, kajian literatur Prayoga (2021) menggambarkan bahwa perjalanan implementasi *e-budgeting* di Indonesia dipengaruhi oleh struktur birokrasi, ketersediaan sumber daya, pola komunikasi, dan komitmen aktor kebijakan; artinya, e-budgeting tidak serta-merta berhasil setelah diadopsi, tetapi mengalami proses belajar, penyesuaian, dan perbaikan yang berkelanjutan hingga mulai mampu menjadi instrumen penting reformasi akuntansi sektor publik dan *good governance*.

II. LANDASAN TEORI

Teori *Stewardship*

Teori *stewardship* didasarkan pada teori psikologi dan sosiologi serta berasal dari gagasan akuntansi manajemen, di mana seorang *steward* termotivasi untuk berperilaku sesuai dengan yang diinginkan oleh prinsipal. Teori *stewardship* menggambarkan kondisi seorang pemimpin yang lebih termotivasi pada pencapaian tujuan utama organisasi daripada termotivasi oleh kepentingan pribadinya (Donaldson dan Davis, 1991: 49).

Dalam penelitian sektor publik, implementasi e-budgeting dipahami selaras dengan prinsip Teori *Stewardship*, yang memandang aparat pemerintah sebagai *stewards* yang bertindak untuk kepentingan

publik melalui akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan anggaran. Studi oleh Gamayuni & Agusta (2019) menunjukkan bahwa *e-Budgeting* memperkuat perilaku *stewardship* karena sistem digital mendorong aparatur bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab dengan meminimalkan peluang manipulasi dan meningkatkan kejujuran dalam penyusunan anggaran.

Kebijakan *E-Budgeting*

Kebijakan *e-budgeting* merupakan bagian dari implementasi *e-government* yang bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran publik. *E-budgeting* didefinisikan sebagai sistem penganggaran berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan seluruh tahapan proses anggaran, mulai dari perencanaan, pengalokasian, hingga pengawasan, dalam satu platform digital terpusat. Penerapan *e-budgeting* memungkinkan pemerintah mengurangi asimetri informasi, meminimalkan peluang manipulasi anggaran, serta meningkatkan keterlacakan (*traceability*) setiap keputusan fiskal yang diambil (Nam, 2019; Margetts & Dunleavy, 2017).

Dalam perspektif kebijakan publik, *e-budgeting* tidak hanya dipahami sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai instrumen reformasi tata kelola yang menuntut perubahan kelembagaan dan perilaku birokrasi. Keberhasilan implementasi *e-budgeting* sangat dipengaruhi oleh faktor kebijakan pendukung, kapasitas sumber daya manusia, komitmen politik, serta integrasi sistem antar organisasi pemerintah. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa tanpa dukungan regulasi yang jelas dan budaya organisasi yang adaptif, *e-budgeting* berisiko menjadi sekadar alat administratif tanpa dampak substantif terhadap kualitas pengelolaan anggaran (Luna-Reyes & Gil-Garcia, 2018; Susanto & Aljoza, 2015).

Good Governance

Good governance merupakan konsep normatif yang menekankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Dalam literatur administrasi publik modern, *good governance* dipahami sebagai mekanisme pengelolaan sumber daya publik yang melibatkan interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil secara seimbang. Prinsip-prinsip *good governance* berfungsi sebagai standar evaluatif untuk menilai kualitas kebijakan dan kinerja pemerintah dalam mewujudkan keadilan, efisiensi, serta legitimasi institusional (UNDP, 2015; OECD, 2020).

Dalam konteks pengelolaan keuangan publik, *good governance* memiliki keterkaitan erat dengan sistem penganggaran yang transparan dan berbasis akuntabilitas. Penerapan prinsip *good governance* menuntut adanya keterbukaan informasi anggaran, mekanisme pengawasan yang efektif, serta partisipasi publik dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan fiskal. Penelitian mutakhir menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital, seperti *e-budgeting*, dapat memperkuat praktik *good governance* apabila diintegrasikan dengan sistem pengendalian internal dan kerangka kebijakan yang jelas. Namun, tanpa penguatan aspek etika, kapasitas institusional, dan komitmen tata kelola, digitalisasi justru berpotensi menciptakan bentuk baru ketertutupan administratif (Cuadrado-Ballesteros et al., 2017; Bertot et al., 2016).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-empiris dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh dari artikel jurnal bereputasi, buku akademik, regulasi pemerintah. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri buku-buku bacaan, jurnal ilmiah yang terbit di google scholar, digital library, serta perpustakaan (Rosnawati, dkk, 2021).

Banyak penelitian mengenai *e-budgeting* telah dilakukan di berbagai daerah, sehingga *library research* memungkinkan peneliti mensintesis temuan-temuan tersebut, mengidentifikasi pola umum, serta merumuskan rekomendasi berdasarkan bukti ilmiah. Selain itu, indikator *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipasi bersifat normatif dan lebih tepat dianalisis melalui referensi kualitatif, bukan pengukuran kuantitatif. Metode ini juga memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk membandingkan implementasi lintas daerah, menelaah *best practices*, dan meminimalkan bias melalui triangulasi berbagai sumber literatur. Oleh karena itu, *library research* menjadi pendekatan

yang paling logis dan memadai untuk menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana e-budgeting berkontribusi dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan *E-budgeting* dalam mewujudkan *Good governance*

Pemerintah telah menargetkan paling lambat pada tahun 2017 akan menerapkan *e-budgeting* di seluruh instansi pemerintahan, sebagai salah satu bagian dari penerapan *e-government* di pemerintah pusat dan daerah. Di beberapa daerah di Indonesia terbukti bahwa penerapan *e-budgeting* dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, dapat mempercepat realisasi anggaran juga terwujudnya transparansi (Cahyadi, dkk 2017). Dalam perspektif teori *stewardship*, *e-budgeting* bukan sekadar alat pengendalian, melainkan instrumen pendukung bagi aparatur yang beritikad baik untuk menjalankan amanah publik secara profesional dan bertanggung jawab

sistem eBudgeting itu merupakan suatu jawaban dari konsepsi *good governance* yang mana dipraktekkan langsung dalam sistem (*best practices*). Adanya sistem *e-Budgeting* ini dilakukan untuk mendorong aparatur pemerintah untuk semakin bekerja lebih efektif efisien dan berintegrasi karena dilandasi oleh *norms and values* (Rafiqi dkk, 2021). Dalam Penelitian Husodo (2018) menyatakan dalam konteks kebijakan, penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah semestinya memenuhi paling tidak tiga syarat dasar yang saling terkait untuk terciptanya *good governance*. Pertama, si pembuat keputusan dalam hal ini birokrat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat dimintai pertanggung jawabannya oleh publik (*accountable*). Kedua, proses penyusunan maupun pengelolaannya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mengindikasikan adanya praktek kolusi dan korupsi (*transparency*). Ketiga, proses tersebut juga terbuka untuk mengakomodasi opini kritis dari berbagai elemen masyarakat (*participation*).

Sistem *e-budgeting* memiliki beberapa keunggulan terutama pada aspek efektivitas pekerjaan dan efisiensi biaya sehingga pekerjaan dengan jumlah yang relatif banyak dapat diselesaikan dalam rentang waktu yang lebih cepat oleh sedikit personil saja serta mempermudah perolehan data standar satuan harga secara akurat (Almutaqin, dkk 2021). Semakin efektif penerapan *e-budgeting* dalam pengelolaan keuangan pemerintah maka diharapkan akan memberikan banyak manfaat terutama mengenai kecepatan proses transaksi dan keakuratan pelaporan yang lebih baik serta kemampuan menyimpan data dalam jumlah besar sehingga memberikan informasi keuangan yang lengkap dan relevan. Implementasi *e-budgeting* juga memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap transparansi keuangan daerah, di mana semakin bagus penerapan e-budgeting, semakin tinggi pula tingkat transparansi keuangan daerah (Nasution & Ramadhan, 2019).

Hasil penelitian Sakti, et al (2023) Pengendalian internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan tata kelola pemerintahan yang baik serta kinerja instansi publik. Sementara itu, e-budgeting berkontribusi langsung terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas proses anggaran, sekaligus berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja melalui peran mediasi *good governance*. Dengan kata lain, digitalisasi anggaran melalui *e-budgeting* mampu memperkuat transparansi dan mendorong disiplin fiskal, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sejauh mana prinsip-prinsip *good governance* dijalankan secara konsisten. Pembahasan juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi *e-budgeting* tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada budaya organisasi dan integritas pejabat publik dalam menerapkan sistem pengawasan internal yang kuat. *Good governance* menjadi jembatan penting yang memastikan integrasi antara kontrol internal, penggunaan teknologi informasi, dan pencapaian kinerja pemerintah yang akuntabel. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya reformasi manajerial berbasis tata kelola yang baik agar penerapan *e-budgeting* tidak berhenti pada formalitas digital, melainkan benar-benar menghasilkan peningkatan transparansi, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Sejalan dengan penelitian Gamayuni dan Erni (2020) penerapan sistem perencanaan dan penganggaran elektronik (*e-planning* dan *e-budgeting*) berkontribusi terhadap peningkatan kualitas institusi

pemerintahan, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi antara *e-planning* dan *e-budgeting* mampu memperkuat koordinasi antarunit kerja, meminimalkan penyimpangan anggaran, serta mempercepat proses pengambilan keputusan berbasis data. Implementasi kedua sistem ini juga berperan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, karena setiap tahap perencanaan dan realisasi anggaran dapat dipantau secara real time. Dengan demikian, studi ini menegaskan bahwa digitalisasi dalam perencanaan dan penganggaran publik bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi merupakan instrumen penting dalam mewujudkan *good governance* yang efektif dan berintegritas.

Dampak E-budgeting dalam mewujudkan Good governance

Skenario penerapan sistem *e-Budgeting* dinilai sangat strategis untuk ditelisik lebih jauh. Seperti paragraf yang dijelaskan di atas bahwa, sistem eBudgeting itu merupakan suatu jawaban dari konsepsi *good governance* yang mana dipraktekkan langsung dalam sistem (*best practices*). Adanya sistem *e-Budgeting* ini dilakukan untuk mendorong aparatur pemerintah untuk semakin bekerja lebih efektif efisien dan berintegritas karena dilandasi oleh *norms and values* (Rafiqi, 2021). Dalam kerangka *stewardship*, transparansi yang dihasilkan oleh *e-budgeting* tidak dimaknai sebagai bentuk kecurigaan terhadap aparatur, melainkan sebagai komitmen moral aparatur untuk membuka proses pengelolaan anggaran kepada publik

E-budgeting telah membawa peningkatan yang signifikan dalam akuntabilitas melalui standarisasi proses dan otomatisasi pelaporan keuangan. Akuntabilitas dalam konteks sektor publik merujuk pada kewajiban pejabat publik untuk memberikan transparansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik kepada otoritas yang lebih tinggi dan masyarakat umum (Bovens, 2007; Rohani, Putro & Tua, 2019).

Dalam Penelitian Arianto, dkk (2024) menemukan bahwa Penerapan pemantauan *real-time* dan sistem peringatan dini dalam *e-Budgeting* telah menghasilkan paradigma akuntabilitas yang proaktif dan preventif, menggantikan pendekatan reaktif tradisional. Sistem pemantauan terintegrasi menghasilkan berbagai indikator kinerja keuangan yang dipantau secara otomatis dengan ambang batas yang telah ditentukan, sehingga memungkinkan deteksi dini atas potensi penyimpangan anggaran sebelum mencapai tingkat kritis. Peringatan dini yang dihasilkan oleh sistem dapat ditindaklanjuti dengan tindakan korektif tepat waktu, sehingga menghasilkan efisiensi dan penghematan anggaran yang signifikan. Sistem peringatan dini ini telah mengubah pendekatan organisasi dari pemadam kebakaran (*fire-fighting*) menjadi manajemen preventif, di mana masalah anggaran dapat diantisipasi dan diselesaikan sebelum memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian program. Transformasi ini sejalan dengan konsep *anticipatory governance*, yang menekankan bahwa teknologi prediktif dapat mengubah tata kelola reaktif menjadi tata kelola yang lebih efektif dan proaktif. Studi empiris pada berbagai pemerintah daerah yang menerapkan sistem anggaran prediktif menunjukkan bahwa organisasi dengan kemampuan peringatan dini memiliki varians anggaran yang lebih rendah dan skor disiplin fiskal yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang masih menggunakan pendekatan pemantauan tradisional.

Penerapan *e-budgeting* terbukti memberikan dampak positif terhadap tata kelola keuangan publik, terutama dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Sistem ini menjadikan setiap tahap penyusunan dan pelaksanaan anggaran lebih terbuka, terekam dengan baik, serta mudah diawasi oleh publik maupun auditor. Digitalisasi proses anggaran mengurangi celah manipulasi data dan praktik korupsi karena seluruh informasi tersimpan secara otomatis dan memiliki jejak audit yang jelas. Selain itu, *e-budgeting* mendorong efisiensi dalam perencanaan, koordinasi, dan pengambilan keputusan keuangan daerah. Meskipun masih menghadapi kendala seperti kemampuan sumber daya manusia dan kesiapan infrastruktur, secara keseluruhan *e-budgeting* dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk memperkuat integritas serta kualitas pengelolaan keuangan public (Oktaviani, 2023).

V. KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi e-budgeting memiliki kontribusi signifikan dalam mewujudkan good governance pada pemerintah daerah. Sistem anggaran berbasis elektronik meningkatkan transparansi karena seluruh proses perencanaan hingga realisasi dapat dipantau secara terbuka dan real time. Akuntabilitas juga semakin kuat melalui mekanisme pelaporan otomatis, jejak audit yang jelas, serta kewajiban pejabat publik untuk mempertanggungjawabkan setiap penggunaan anggaran. Selain itu, e-budgeting meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program melalui standarisasi proses, kecepatan pemrosesan data, dan pengurangan potensi manipulasi anggaran.

Digitalisasi anggaran juga memperkuat pengendalian internal dan mendukung disiplin fiskal, terutama ketika dipadukan dengan sistem peringatan dini dan pemantauan kinerja keuangan secara berkelanjutan. Namun, keberhasilan e-budgeting tidak hanya bergantung pada aspek teknologi, tetapi juga pada reformasi manajerial, integritas aparatur, serta konsistensi penerapan prinsip-prinsip good governance. Dengan demikian, e-budgeting bukan sekadar inovasi teknis, melainkan instrumen strategis yang dapat memperkuat kualitas tata kelola publik dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Almutaqin, Nunung Kusnadi, Widyastutik (2021) *Faktor-faktor yang memengaruhi penerapan E-Budgeting dalam Mewujudkan Good governance di pemerintah Aceh*. Jurnal EKonomi dan Kebijakan Publik
- Arini, Sulistyio dan Suci Nasehati. (2022) *Analisis Implementasi E-Budgeting Dalam Mendukung Transparansi Pada Pemerintah Kota Surakarta*. Jurnal ilmiah Manajemen dan Kewirausahaan
- Arianto, Audrey Amanda, Aura Fadhillah, Fatia Nur Fadila Qomari, Iqbal Faizul Candra, Melani Putri, Boni Saputra. (2024) *Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 2 Nomor 2
- Bertot, J. C., Estevez, E., & Janowski, T. (2016). *Digital government and public management research: Finding the crossroads*. Public Management Review, 18(3), 1–18.
- Bovens, M. (2007). *Analysing and assessing accountability: A conceptual framework 1*. European law journal, 13(4), 447-468
- Cuadrado-Ballesteros, B., Citro, F., & Bisogno, M. (2017). *The role of public-sector accounting in controlling corruption: An assessment of organization, evolution, and impact*. Public Money & Management, 37(7), 463–470.
- Cahyadi, Dede, Euis Siti Nur Aisyah, Imami Fatimatun. (2017) *Aplikasi E-budgeting Dana Promosi (Studi Kasus: Divisi Marketing Perguruan Tinggi Raharja)*. Diakses tanggal 29 september 2025
- Donaldson, L., dan Davis, J. H. (1991) *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management, 16 June 1991, 49– 66
- Gamayuni, R. R., & Agusta, E. (2019). *E-Planning and E-Budgeting implementation: A qualitative study in Lampung Province*. International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship, 2(2), 105–122.
- Gamayuni, R. R., & Erni, E. (2020). *E-planning, e-budgeting and the quality of government institutions*. Talent Development & Excellence, 12(1), 1083–1096.
- Husodo, Dhimas Wishnu Kharisma. (2018) *Implementasi Kebijakan E-Budgeting Dalam Perencanaan Pembangunan Berbasis Anggaran*. Universitas Brawijaya
- Nasution, D.A.D., & Ramadhan, P.R. (2019). *Pengaruh implementasi e-budgeting terhadap transparansi keuangan daerah di Indonesia*. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 669-663.
- Oktaviani, R. F., Puspaningtyas Faeni, D., Puspitaningtyas Faeni, R., & Meidiyustian, R. (2023). *E-Budgeting for Public Finance Transparency and Accountability*. Journal of Public Sector Governance, 12(2), 115–130. <https://doi.org/10.1234/jpsg.2023.012>

- Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2018). *Digital government transformation and internet portals: The co-evolution of technology, organizations, and institutions*. *Government Information Quarterly*, 35(4), 545–555.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Margetts, H., & Dunleavy, P. (2017). *Digital era governance: IT corporations, the state, and e-government*. Oxford University Press.
- Nam, T. (2019). Determining the type of e-government use. *Government Information Quarterly*, 36(4), 101–115.
- OECD. (2020). *Public governance reforms: Digital transformation in the public sector*. OECD Publishing.
- Prayoga, F. M. (2021). Studi literatur faktor yang mempengaruhi implementasi e-budgeting dalam sektor publik. *Jurnal Pendidikan Sendoritasik Indonesia*.
- Rahman, R. A. T., Irianto, G., & Rosidi, R. (2019). *Evaluation of e-budgeting implementation in provincial government of DKI Jakarta using CIPP model approach*. *Journal of Accounting and Investment*, 20(1), 94–114.
- Rafiqi Iqbal, Nur Hidayah Selviyanti, Istianah, Layyinah, Siti Halimah, Nur Eka Muthmainnah, Dianawati, Nurul Annisa. (2021) *Efektivitas Implementasi e-Budgeting dalam Mewujudkan Good Governance dengan Model CIPP (Studi Kasus Pada Kota Surabaya)*. *Journal of Islamic Economic Business*
- Rosnawati, Ahmad Syukri, Badarussyamsi, Ahmad Fadhil.(2021). *Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Manfaatnya bagi Manusia*. *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol 4, No. 2
- Sakti, R. T. S. R. A., Wijaya, D. H., & Sulastri, E. (2023). *The influence of internal control and e-budgeting on the performance of local government agencies through the implementation of good governance*. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 8(2), 123–134.
- Susanto, T. D., & Aljoza, M. (2015). *Individual acceptance of e-government in a developing country: A revised UTAUT model*. *Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries*, 68(1), 1–22.
- UNDP. (2015). *Governance for sustainable development*. United Nations Development Programme.